



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001
TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR (STUDI KASUS KILANG SAGU DI DESA
TENAN KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)*



OLEH :

FIRDAUS

NIM : 11527102822

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

PEKANBARU (RIAU)

2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Kasus Kilang Sagu Di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)”** yang ditulis oleh :

Nama : Firdaus
 NIM : 11527102822
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 September 2020

Pembimbing Skripsi

FIRDAUS, SH., MH

NIP. 19661002 199403 1 002

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (STUDI KASUS KILANG SAGU DI DESA TENAN KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**” yang ditulis oleh :

Nama : Firdaus
NIM : 11527102822
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 10 Desember 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQSAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

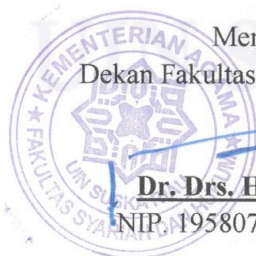
Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

.....
.....
.....
.....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firdaus
 NIM : 11527102822
 Tempat/Tanggal Lahir : Selatpanjang, 19 November 1996
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM
 Universitas : UIN SUSKA RIAU

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (STUDI KASUS KILANG SAGU DI DESA TENAN KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)”** adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, Desember 2020
 Yang membuat pernyataan

FIRDAUS
 NIM : 11527102822



ABSTRAK

Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat banyak industri kilang sagu yang beroperasi. Kilang-kilang sagu ini nantinya akan akan mengolah sagu menjadi tepung dan diekspor ke daerah luar. Dalam menjalankan kegiatan industri ini ternyata masih banyak kilang sagu yang tak memiliki izin tertulis bahkan tak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang memadai serta pengelolaan limbah yang tidak tepat salah satunya yaitu kilang sagu yang terdapat di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana limbah-limbah tersebut mencemari lingkungan sekitar kawasan industri seperti menimbulkan bau yang tidak sedap serta terjadinya perubahan warna yang membuat air sungai menjadi kotor akibat masuknya material (limbah sagu) ke sungai tersebut yang dikarenakan kurangnya perawatan kolam penampungan yang membuat kolam tersebut akhir menjadi penuh dan meluap keluar akibat tumpukan tumpukan limbah sagu tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air pada kilang sagu di desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti? dan apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air serta untuk mengetahui faktor penghambat dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *Random Sampling* yaitu mengambil sampel dari populasi secara random atau acak dimana setiap individu atau setiap unit sampling dalam populasi mempunyai untuk mendapat kesempatan yang sama untuk diambil atau dipilih menjadi sampel dan *Total Quota Sampling* yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti ini belum berjalan dengan maksimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang mana Kabupaten Kepulauan Meranti masih kekurangan pegawai dan tidak memiliki Pejabat Pengawas lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) serta adanya ketidaktahuan dan kurangnya informasi oleh pihak kilang sagu.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pengelolaan, dan Pengendalian.



KATA PENGANTAR

Assalamua`laikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Selanjutnya tidak lupa pula penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menyampaikan risalah islam sehingga kita berada di zaman yang dengan cahaya ilmu pengetahuan dan kebaikan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH., MH dan Sekretaris Jurusan Bapak Muslim, S.Ag, SH., M.Hum serta staf jurusan ilmu hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Firdaus, SH., MH sebagai pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Dra. Nurlaili, M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.
8. Teristimewa untuk kedua orang tua Ayahanda Tarmizi dan Ibunda Ainun beserta keluarga dan saudara yang memberikan do'a, nasehat dan dukungan moril dan materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dengan baik dan tepat waktu.
8. Kepada kawan-kawan kelas Ilmu Hukum C dan HTN C, serta kawan-kawan seangkatan 2015 yang telah berjuang bersama-sama belajar menjadi orang yang bermanfaat.
9. kepada rekan merayau Squad Rudi, Afni, Nurul, Novi, Bang Edel, Desma, Ulfa, Fitri, Widya dan juga kedua sepupu seperjuangan Mbak Nana dan Reni Oren serta teman dekat Misah dan Tutik yang telah memberi motivasi dan dukungan selama ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada rekan seangkatan Ayu rahmawati, Hijratul Amal, Habibi Hamdani, Emel, Isra, erza, Tari, Dika, Hendrico.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, serta memiliki banyak kelemahan maupun keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Juni 2020

FIRDAUS

NIM : 11527102822



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	16
A. Kabupaten Kepulauan Meranti	16
1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti	16
2. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti	17
B. Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Desa Tenan	18
1. Kecamatan Tebing Tinggi Barat	18
2. Desa Tenan	20
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti	21
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	31
A. Pengertian Pelaksanaan	31
B. Hukum Lingkungan	32
1. Pengertian Hukum Lingkungan	32
2. Perusakan Lingkungan	33
3. Keputusan AMDAL	38
C. Pengelolaan Kualitas Air	39



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Pengendalian Pencemaran air	41
E. Peraturan Perundang-undangan.....	43

BAB IV PEMBAHASAN.....45

A. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Pada Kilang Sagu Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)	45
B. Faktor penghambat pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Pada kilang sagu Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)	55
1. Sumber Daya Manusia	56
2. Ketidaktahuan	56

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....63

A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA65

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dari tahun 1988 sampai 1999 dinyatakan bahwa sektor industri dianggap dapat membuka struktur ekonomi Indonesia dari bercorak pertanian menjadi struktur ekonomi yang lebih kokoh dan seimbang, sedangkan dalam GBHN tahun 1999 dipertegas bahwa salah satu sasaran bidang pembangunan jangka panjang kedua adalah bidang ekonomi yang bercirikan industri kuat dan maju, penggunaan sumber daya alam yang optimal serta terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.¹

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam terbarui (renewable resources) maupun sumber daya alam tak terbarui (non-renewable resources), memiliki sumber daya manusia baik yang cendekia maupun profesional, lahan untuk pendirian industri, modal, serta prasarana lainnya sehingga dunia industri tumbuh dan berkembang cepat untuk menghasilkan produk baru dan jasa pelayanan, namun di samping itu terjadi pula limbah industri yang akan merusak lingkungan.² Padahal didalam undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan hidup di sebutkan dalam pasal 6 ayat 1 yaitu “*setiap orang*

¹ Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011) h.1

² *Ibid*, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan’’³

Limbah yang dihasilkan akibat aktivitas manusia, baik dalam bentuk cair, padat maupun gas, merupakan ancaman yang bila tidak diantisipasi secara dini dan tepat akan merupakan bencana bagi kehidupan di bumi. Tanah dan air tanah sebagai komponen lingkungan yang merupakan sumber daya alam telah mengalami akibat dari limbah yang tak terkelola secara semestinya, padahal banyak masyarakat masih menggunakan air tanah sebagai sumber air yang utama.

Air tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi manusia. Sampai saat ini air tanah masih merupakan sumber air yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Air tanah mempunyai peran penting , karena mudah diperoleh dan kualitas nya relatif baik. Masyarakat dari negara yang kurang maju atau yang tinggal di daerah terpencil umumnya memanfaatkan air tanah sebagai sumber air untuk kehidupan sehari-hari. Masih banyak manusia yang mengandalkan air tanah untuk pertanian dan industri. Oleh karena itu, kualitas dan kuantitas air tanah menjadi penting untuk dijaga.⁴

Seperti yang disebutkan di dalam peraturan pemerintah No. 82 Tahun 2001 pada bagian menimbang, yaitu:

1. Bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan dan

³ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Suprihanto Notodarmojo, *Pencemaran Tanah dan Air Tanah*, (Bandung: ITB, 2005) h.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perikehidupan manusia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum, sehingga merupakan modal dasar dan factor utama pembangunan.

2. Bahwa air merupakan komponen lingkungan hidup yang penting bagi kelangsungan hidup dan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
3. Bahwa untuk melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.⁵

Di dalam kegiatan industri dan teknologi, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran. Air tersebut harus diolah terlebih dahulu agar mempunyai kualitas yang sama dengan kualitas air lingkungan. Jadi air limbah industri harus mengalami proses daur ulang sehingga dapat

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan lagi atau dibuang kembali ke lingkungan tanpa menyebabkan pencemaran air lingkungan.⁶

Dalam menjalankan suatu industri yang berdampak penting terhadap lingkungan dan sudah semestinya perlu memperhatikan izin instalasi pengolahan air limbah (IPAL) agar kondisi lingkungan sekitar senantiasa terjaga dan dapat berjalan dengan baik. Namun dengan semakin banyak berdirinya kilang sagu saat ini, ternyata masih banyak banyak industri kilang sagu di Kabupaten Meranti yang belum memiliki izin IPAL dari pemerintah, banyak kilang sagu di kabupaten kepulauan meranti yang terdapat kesalahan dalam pengelolaan limbah mulai dari pengelolaan limbah yang tidak tepat, perawatan kolam tidak ada dan kolam limbah dibiarkan begitu saja. Seiring waktu kolam yang dibuat menjadi penuh akibat penumpukan limbah selama bertahun-tahun sehingga terjadilah pendangkalan pada kolam limbah hingga akhirnya meluap dan kembali mengalir ke sungai.⁷

Dengan masuk nya material (limbah sagu) ke sungai tentu saja menimbulkan efek dan membuat air sungai menjadi tercemar seperti bau busuk karena endapan limbah sagu tersebut dan juga kekeruhan yang mana menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam badan air sehingga menyebabkan kualitas air akan menurun. Selain menyebabkan pendangkalan, ekosistem akuatik juga akan terganggu sehingga organisme akuatik tidak dapat hidup dengan baik dan organisme yang untuk hidupnya

⁶ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi, 2004) h.74

⁷ http://news.meranti.go.id/web/post_full/6446

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membutuhkan cahaya juga akan mati. Zat-zat yang ada di dalam air adalah zat-zat kimia terurai yang memerlukan oksigen terlarut, yang jika berada di perairan normal dalam waktu yang lama.⁸

Limbah air mengakibatkan badan penerima menjadi kotor dan senyawa-senyawa pencemar yang terkandung membahayakan terhadap lingkungan. Disamping itu perubahan air menjadi kotor perubahan air dilapisi bahan-bahan berminyak atau bahan padatan lain yang menyebabkan terjadinya penutupan permukaan air.⁹

Setiap pencemar berasal dari suatu sumber tertentu. Sumber ini penting, karena merupakan pilihan pertama untuk melenyapkan pencemar itu. Setelah pencemar ini dibebaskan oleh sumber kemudian sampai kepada penerima. Penerima inilah yang di pengaruhi oleh pencemar. ikan menjadi penerima pencemar deterjen atau racun yang masuk ke dalam perairan. Kadang-kadang racun itu mengendap dan tinggal lama di dalam dasar danau, sungai, atau laut. Timbullah misalnya dinding batu kapur yang berasal dari asam sulfat yang bereaksi.¹⁰ Hal ini tidak hanya merugikan ekosistem di sungai akan tetapi juga merugikan pihak masyarakat sekitar yang berada di lingkungan kilang sagu tersebut. Salah satu nya mereka tidak dapat memanfaatkan laut/sungai tersebut.¹¹

⁸ Soedarto, *lingkungan dan kesehatan*, (Jakarta: Sagung Aeto, 2013) h.26-27

⁹ Perdana Ginting, *sistem pengelolaan lingkungan dan limbah industry*, (Bandung: Yrama Widya, 2007) h.31

¹⁰ Tresna Sastrawijaya, *pencemaran lingkungan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000) h.3

¹¹ <http://www.wartariau.com/read-27328-2018-09-01-limbah-pabrik-pengolahan-sagu-di-meranti-matikan-habitat-ikan.html>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudah seharusnya izin ini wajib dimiliki bagi setiap pelaku industri tertentu. Sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang mana pada pasal 40 ayat 1 berbunyi “*setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota*”

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (STUDI KASUS KILANG SAGU DI DESA TENAN KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)”**

B. Batasan Masalah.

Berhubungan dengan latar belakang diatas agar pembahasan ini lebih terarah dan menghindari agar tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka dengan ini penulis membatasi pembahasan ini hanya pada pelaksanaan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan limbah sagu terhadap kilang sagu diwilayah desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah.

Dengan adanya latar belakang diatas maka dapatlah dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (pada kilang sagu Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti) ?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Pada kilang sagu Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti) ?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.

a. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (Pada kilang sagu Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti).
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengendalian pencemaran air (Pada kilang sagu Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti).

b. Kegunaan Penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air (studi kasus kilang sagu Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti).
- b. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Metode Penelitian.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Jenis dan Sifat Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hokum sosiologis, dimana pennis secara langsung turun ke lapangan untuk melakukan observasi mencari data yang diperlukan.¹² Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, dengan memberikan gambaran dan uraian pokok permasalahan secara jelas sehingga dapat dipahami, dengan cara menitik beratkan pada penelitian lapangan secara meyeluruh,

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), cet ke-12, h.14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sistematis, dan akurat, serta ditunjang dengan penelitian kepustakaan / peraturan yang dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang diperoleh.

b. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan Di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dan kilang sagu di desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti adalah karena adanya masalah tentang izin pengelolaan limbah kilang sagu di desa Tenan kecamatan tebing tinggi kabupaten kepulauan meranti berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

c. Subjek dan Objek Penelitian.

Subjek penelitian ini adalah Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, pemilik kilang sagu, pekerja kilang sagu, dan warga desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001.

d. Populasi dan Sampel.

a. Populasi.

Keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹³

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Meranti, 1 orang pemilik kilang sagu di desa Tenan, 15 orang pekerja kilang sagu di Desa tenan dan 550 orang warga dusun 1 Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Sampel.

Adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian.¹⁴ Sebagian dari populasi yang mewakili keseluruhan subjek penelitian yang mempermudah penelitian ini. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah *Random Sampling*, mengambil sampel dari populasi secara random atau acak dimana setiap individu atau setiap unit sampling dalam populasi mempunyai untuk mendapat kesempatan yang sama untuk diambil atau dipilih menjadi sampel,¹⁵ dan *Total Quota Sampling*, yaitu menjadikan seluruh populasi menjadi sampel.

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Meranti, 1 orang pemilik kilang sagu di desa Tenan, 15 orang pekerja kilang sagu

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 215

¹⁴ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011) h. 23

¹⁵ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012) H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di desa tenan kecamatan tebing tinggi barat kabupaten kepulauan meranti dan 275 orang warga dusun 1 Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1.1
Populasi dan Sampel

NO	RESPONDEN	POPULASI	SAMPEL	PRESENTASE
1	Seksi pencemaran dan kerusakan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Meranti	1	1	100%
2	Pemilik kilang sagu desa Tenan Kab. Meranti	1	1	100%
3	Pekerja kilang sagu desa Tenan Kab. Meranti	15	15	100%
4	Masyarakat dusun 1 desa Tenan Kab. Meranti	550	275	50%

e. Data dan Sumber Data.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Data Primer.

Data primer yaitu merupakan data atau keterangan yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁶ Pada penelitian ini data primer yang di dapat penulis yaitu berasal dari responden secara langsung dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara berkaitan dengan kilang sagu di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Adapun data sekunder dari penelitian ini yaitu diperoleh secara tidak langsung oleh penulis untuk mendukung data primer seperti buku-buku tentang hukum, jurnal dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kilang sagu.

c. Data Tersier.

Data tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-lain.¹⁸

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015) cet ke-6, h. 175.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Soerjono Soekanto, *loc. cit.*, h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Teknik Pengumpulan Data.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan langsung, terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (studi kasus kilang sagu di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti).
- b. Wawancara, adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang, yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden .¹⁹
- c. Angket, yaitu merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan atau menyebarkan daftar pertanyaan yang dibuat secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Yang mana jawaban didapat dari responden adalah data yang dibutuhkan oleh penulis.
- d. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

g. Analisis Data.

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara analisis deskriptif.

Analisis deskriptif adalah menggambarkan karakteristik suatu fenomena yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian.²⁰ Dalam hal ini

¹⁹ Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004) h.82.

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) cet ke-4, h. 12.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis menganalisis fakta-fakta dan data-data dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (studi kasus kilang sagu di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti) yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori dan aturan-aturan yang ada, sehingga tercapai kesimpulan akhir.

F. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan skripsi ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN.

Yaitu berisi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.

Pada bab ini berisi tentang sejarah dan kondisi geografis Kabupaten Meranti, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Meranti, susunan organisasi dan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup, sejarah dan tujuan berdirinya kilang sagu. Di desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat sebuah kilang sagu yang mana kilang sagu ini merupakan suatu lapangan kerja bagi warga lokal. Kilang sagu ini setidaknya memiliki 15 orang karyawan yang bergerak dalam mengolah batang sagu (tual)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi tepung sagu yang mana tepung sagu ini nanti nya di ekspor di daerah luar Kabupaten Meranti.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA.

Berisi tentang kajian teoritis, yang menyangkut tentang lingkungan serta wewenang pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air).

BAB IV : PEMBAHASAN.

Berisi tentang hasil penelitian yang terdiri atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2002 dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

BAB V : PENUTUP.

Yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009 yang mulai diberlakukan pada tanggal 16 Januari 2009. Dengan memperhatikan kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan dan pertimbangan dari aspek sosial politik, social budaya, pertahanan dan keamanan serta dengan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Kabupaten Bengkalis, dipandang perlu membentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di wilayah provinsi Riau, dengan membentuk undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di provinsi Riau.²¹

Dasar hukum undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang pemebentukan Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah sebagai berikut.

- a. Pasal 18, pasal 18A, pasal 20 dan pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²¹ <http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/529>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah.
- c. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau sebagai undang-undang.
- d. undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Dalam undang-undang ini diatur tentang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang mana terdiri dari sembilan kecamatan yaitu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, Kecamatan Rangsang Barat, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kecamatan Merbau, kecamatan Pulau merbau, dan Kecamatan Tasik Putri Puyu.²²

2. Kondisi Geografis Kabupaten Kepulauan Meranti.

Secara geografis kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar $0^{\circ} 42' 30'' - 1^{\circ} 28' 0''$ LU, dan $102^{\circ} 12' 0'' - 103^{\circ} 10' 0''$ BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang

²² *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triangle*) Indonesia - Malaysia - Singapore (IMS-GT)) dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah *Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tj. Balai Karimun*. Dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi sebagai *Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional* yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota *Pusat Kegiatan Strategis Negara* yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri. Luas kabupaten Kepulauan Meranti : 3707,84 km², sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km². Batas-batas wilayah kabupaten Kepulauan Meranti yaitu, bagian Utara (Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis), Bagian Timur (Kabupaten Karimun dan Provinsi Kepulauan Riau), Bagian Selatan (Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan) Dan Bagian Barat (Kabupaten Bengkalis)²³

B. Kecamatan Tebing Tinggi Barat dan Desa Tenan.

1. Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

²³ http://id.wikipedia.org/wiki/kabupaten_kepulauan_Meranti

Tebing Tinggi Barat adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia. Ber-ibukota di Alai. Keadaan Geografi Kecamatan Tebing Tinggi Barat sebagai berikut.

- a. Utara : Kec. pulau Merbau dan Kec. Rangsang Barat.
- b. Selatan : Kabupaten Siak.
- c. Barat : Kecamatan Merbau dan Kabupaten Siak.
- d. Timur : Kecamatan Tebing Tinggi.

Kecamatan Tebing Tinggi Barat Terdiri 12 desa :

- a. Desa Mekong.
- b. Desa Insit.
- c. Desa Batang Malas.
- d. Desa Tenan.
- e. Desa Kundur.
- f. Desa Tanjung Peranap.
- g. Desa Tanjung.
- h. Desa Alai.
- i. Desa Maini Darul Ama.
- j. Desa Mengkikip.
- k. Desa Alai Selatan.
- l. Desa Tanjung Darul Takzim.
- m. desa gogok Darussalam.²⁴

²⁴https://id.wikipedia.org/wiki/Tebing_Tinggi_Barat,_Kepulauan_Meranti.

Jumlah penduduk di Kecamatan tebing tinggi barat berjumlah 15.126 orang, terdiri dari laki-laki 7.849 orang dan perempuan 7.277 orang. Jumlah keluarga di kecamatan Tebing Tinggi Barat ada 3.447 keluarga. Adapun sektor di bidang pertanian di Kecamatan Tebing Tinggi Barat yaitu :

- a. Tanaman pangan, Produksi tanaman bahan makanan dikecamatan tebing tinggi barat jagung 10,05 ton; ketela rambat 23,25 ton; ketela pohon 50,80 ton.
 - b. Perkebunan, Luas area tanaman perkebunan rakyat dikecamatan tebing tinggi barat yaitu untuk tanaman karet 2.972 ha ; kelapa 856 ha; sagu 2.573 ha; sedangkan Produksi tanaman perkebunan rakyat diantaranya karet 8.193 ton ; kelapa 645 ton; sagu 26.262 ton.²⁵
2. Desa Tenan.

Awal mula terbentuknya Desa Tenan pada tahun 1961 dan terletak di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pemerintahan Desa Tenan dahulu di pimpin oleh penghulu, lalu seiring waktu nama penghulu di ubah menjadi Kepala Desa. Desa Tenan dahulu nya dipimpin oleh penghulu pada tahun 1940 yang bernama Boduk. Selanjutnya tahun 2009 - Sekarang di pimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Samsi.

Desa Tenan memiliki 3 suku, yaitu : Suku akit (suku asli desa tenan), Suku Melayu, dan Suku Jawa. Pekerjaan masyarakat tenan antara lain, Berkebun, Nelayan, dan Pengerajin Seni. Desa Tenan terdiri dari 3 dusun, dusun I Jukrah,

²⁵ *Ibid*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dusun II Sukajadi dan dusun III Tenggayun. Luas wilayah desa tenan 7.350 ha yang di batasi sebelah Utara desa batang malas, sebelah selatan desa Tanjung, sebelah barat desa kundur dan desa Tanjung peranap, sebelah timur desa Tanjung dan desa maini darul aman.²⁶

B. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.

1. Sejarah Dinas Lingkungan Hidup.

Secara kelembagaan Dinas Lingkungan Hidup merupakan satuan kerja perangkat yang yang mengemban sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup. Kantor Lingkungan Hidup berdiri pada tahun 2008. Pada tahun 2011 berubah menjadi Badan Lingkungan Hidup. Kemudian pada tahun 2017 Badan Lingkungan Hidup berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup yang beralamat di Jalan Pembangunan 1 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup.

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dinas Lingkunagn Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti telah merumuskan Visi dan Misi sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang lingkungan hidup.²⁷

Visi :

²⁶ <https://profil-desatenan.blogspot.com>

²⁷ Sumber Data : Dokumen Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Misi :

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang proaktif di bidang lingkungan hidup.
3. Menciptakan kota bersih, indah, nyaman dan asri.
4. Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam.

Pencapaian tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Visi dan Misi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti yang di rumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.
3. Meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.
4. Meningkatnya kapasitas sumber daya alam upaya pengelolaan lingkungan hidup.²⁸
3. Struktur Organisasi.

²⁸ Ibid





4. Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

Tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup terdapat dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 37 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten pada bidang lingkungan hidup menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi pada dinas lingkungan hidup.²⁹

2. Sekretaris.

Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan bidang-bidang perumusan, umum, kepegawaian, perencanaan program, evaluasi, pelaporan dan administrasi keuangan dan perlengkapan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
- b. Menyusun rencana dan program kegiatan kesekretariatan.

²⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas yang meliputi umum, kepegawaian, program, keuangan dan perlengkapan.
- d. Melaksanakan pengawasan urusan keuangan dengan meliputi laporan yang dibuat oleh akuntan agar pengeluaran anggaran sesuai rencana.
- e. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas.
- f. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala dinas tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu di ambil di bidang tugasnya.
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.³⁰

3. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup mempunyai tugas pengelolaan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup menjalankan tugas dan kewajibannya menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut.
- c. Penentuan baku mutu lingkungan.
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi.

³⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar.
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat.
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi.
- k. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- l. Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- m. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.
- n. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.
- o. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan.
- p. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam.
- q. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam.³¹

³¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- r. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- s. Pelaksanaan pancangan sumber daya alam.
- t. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- u. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
- v. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- w. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- x. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- y. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- z. Pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.

Susunan organisasi bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup terdiri dari :

- a. seksi pencemaran lingkungan.
- b. Seksi kerusakan lingkungan.
- c. Seksi pemeliharaan lingkungan hidup.³²

Seksi pencemaran lingkungan mempunyai tugas pemantauan terhadap sumber pencemar dan pengendalian terhadap pencemaran institusi dan non institusi memiliki tugas:

- a. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi.
- b. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah dan pesisir laut.

³² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penentuan baku mutu lingkungan.
- d. Pelaksanaan penanggulangan pencemaran (peemberian informasi, pengisolasian, serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- e. Pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi, dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi.
- f. Penentuan baku mutu sumber pencemar.
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan kepada masyarakat.
- h. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi
- i. Pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- j. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemaran institusi dan non institusi.
- k. Penyediaan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).³³

Seksi kerusakan lingkungan mempunyai tugas pengendalian dan pemulihan terhadap kerusakan lingkungan memiliki tugas:

- a. Penetuan kriteria baku kerusakan lingkungan.
- b. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan.

³³ *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan.
- d. Pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi, dan restorasi) kerusakan lingkungan.

Seksi pemeliharaan lingkungan hidup mempunyai tugas pemeliharaan dan pelestarian terhadap sumber daya alam. Keanekaragaman hayati serta adaptasi mitigasi perubahan iklim. Adapun tugas seksi pemeliharaan lingkungan hidup terdiri dari:

- a. Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam.
- b. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam.
- c. Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.
- d. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam.
- e. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
- f. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.
- g. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- h. Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati.
- i. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati.
- j. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati.
- k. Pengembangan informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.³⁴

³⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Unit Pelaksanaan Teknis Data.

Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPTD).

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan keahlian dan kebutuhan daerah.³⁵

³⁵ *Ibid*

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pelaksanaan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.³⁶

Pengertian pelaksanaan menurut beberapa ahli.

a) Menurut Westra.

pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

b) Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo.

Pengertian Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

c) Siagian S.P.

³⁶ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.70

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemukakan bahwa Pengertian Pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.

- d) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Merumuskan Pengertian Pelaksanaan adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.³⁷

B. Hukum Lingkungan.

1. Pengertian Hukum Lingkungan.

Rodgers Jr, seorang serjana di Amerika Serikat, berpendapat bahwa hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari bidang-bidang kajian atau disiplin lain dalam ilmu hukum. Menurut Rodgers Jr, hukum lingkungan berkaitan dengan hukum administrasi negara, tanggung gugat perdata, dan hukum pidana.³⁸

Siti Sunardi Rangkuti menyatakan hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya yang apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi. Sanksi yang ternuat dalam hukum lingkungan merupakan sanksi-sanksi yang telah diatur sebelumnya dalam hukum perdata, hukum pidana, serta hukum administrasi. Bisa disimpulkan Siti Sunardi menyatakan hukum lingkungan menyangkut penetapan nilai-nilai yang sedang

³⁷ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu), 2011.

³⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers) h.28

berlaku dan nilai-nilai yang diharapkan diberlakukan di masa mendatang serta mendapat disebut “hukum” yang mengatur tatanan lingkungan hidup.³⁹

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disana menjelaskan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilukunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁴⁰

2. Perusakkan Lingkungan.

Perusakkan Lingkungan apabila ditinjau dari peristiwa terjadinya dapat dibagi menjadi dua:

a. Perbuatan Manusia.

Berdasarkan sudut pandang sarjana, maka setidaknya ada lima faktor yang melatarbelakangi timbulnya masalah-masalah lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia, yakni teknologi, penduduk, dan ekonomi.⁴¹

1) Teknologi.

Barry Comonner (1973) dalam bukunya “the Closing Circle” melihat bahwa teknologi merupakan sumber terjadinya masalah-masalah lingkungan. Terjadinya revolusi di bidang Ilmu Pengetahuan Alam misalnya fisika dan kimia, yang terjadi

³⁹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006) h.170

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁴¹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, h.6



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

selama lima puluh terakhir, telah mendorong perubahan-perubahan besar di bidang teknologi, dan menimbulkan berbagai pencemaran lingkungan seperti, pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara.

a. Pencemaran Air.

Di dalam tata kehidupan manusia, air banyak memegang peranan penting antara lain untuk minum, memasak, mencuci dan mandi. Di samping itu air juga banyak digunakan untuk mengairi sawah, ladang, industry dan masih banyak lagi. Tindakan manusia dalam pemenuhan kegiatan sehari-hari, secara tidak sengaja telah menambah jumlah bahan anorganik pada perairan dan mencemari air. Misalnya, pembuangan detergen ke perairan dapat berakibat buruk terhadap organisme yang ada diperairan.

Pemupukan tanah persawahan dengan pupuk buatan, kemudian masuk ke perairan akan menyebabkan pertumbuhan air yang tidak terkendali yang disebut eutrofikasi atau blooming. Beberapa jenis tumbuhan seperti alga, paku air dan eceng gondok akan tumbuh subur dan menutupi permukaan perairan sehingga cahaya matahari tidak menembus sampai dasar perairan.⁴²

Akibatnya, tumbuhan yang ada di bawah permukaan tidak dapat berfotosintesis sehingga kadar oksigen yang terlarut di dalam air menjadi berkurang. Bahan-bahan kimia lain seperti pestisida atau DDT (Dikloro Trikloroetana) yang sering digunakan petani untuk memberantas hama tanaman juga dapat berakibat buruk terhadap tanaman dan organisme lainnya. Apabila

⁴² Raihan, *Lingkungan Dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2007) h. 34

didalam ekosistem perairan terjadi pencemaran DDT atau pestisida, akan terjadi aliran DDT.

b. Pencemaran Tanah.

Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan mahluk hidup lainnya termasuk manusia. Kualitas tanah dapat berkurang akibat proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang. Selain itu, menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah padat yang mencemari tanah. Menurut sumbernya, limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri dan alam (tumbuhan). Adapun menurut jenisnya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik berasal dari sisa-sisa mahluk hidup seperti, dedaunan, bangkai binatang, dan kertas. Adapun sampah anorganik biasanya berasal dari limbah industri, seperti plastik, logam dan kaleng. Sampah organik pada umumnya mudah dihancurkan dan dibusukkan oleh mikroorganisme didalam tanah. Adapun sampah anorganik tidak mudah hancur sehingga dapat menurunkan kualitas tanah.⁴³

c. Pencemaran Udara.

Udara dapat dikatakan tercemar jika udara tersebut mengandung unsur-unsur yang mengotori udara. Pencemar udara berbentuk partikel cair atau padat. Partikel dalam bentuk cair berupa titik-titik air atau kabut. Kabut dapat menyebabkan sesak nafas jika terhisap ke dalam paru-paru. Sedangkan partikel dalam bentuk padat berupa debu atau abu vulkanik. Selain itu, dapat juga berasal

⁴³ Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) h.23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dari makhluk hidup, misalnya bakteri, spora, virus, serbuk sari, atau serangga-serangga yang telah mati. Partikel-partikel tersebut merupakan sumber penyakit yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Partikel yang mencemari udara juga dapat berasal dari pembakaran bensin. Bensin yang digunakan dalam kendaraan bermotor biasanya dicampur dengan senyawa timbal agar pembakarannya cepat dan mesin berjalan lebih sempurna.⁴⁴

2) Pertumbuhan Penduduk.

Ehrlich dan Holdren menekankan, bahwa pertumbuhan- pertumbuhan penduduk dan peningkatan kekayaan memberikan sumbangan penting terhadap penurunan kualitas lingkungan. Mereka menunjukkan beberapa contoh, yakni terjadinya gurun pasir di lembah Sungai Euphrate dan Sungai Tigris, yang pada zaman sebelum Masehi terkenal sebagai kawasan subur. Terjadinya kerusakan pada kawasan yang semula subur itu disebabkan oleh system irigasi yang gagal dan pembukaan lahan yang terus-menerus akibat pertumbuhan penduduk sehingga semakin luas lahan pertanian berdasarkan sistem irigasi.

Di kawasan-kawasan yang curah hujannya rendah kegagalan pengelolaan irigasi sering kali menimbulkan masalah-masalah lingkungan hidup yang serius, yaitu terjadinya masalah salinisasi (peningkatan kandungan garam di tanah), kekeringan air irigasi sangat potensial menyebabkan terjadinya gurun pasir.

3) Motif Ekonomi

⁴⁴ *Ibid*, h.24



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hardin (1977) dalam karya tulisnya, “The Tragedy of the Commons” melihat bahwa alasan-alasan ekonomi yang sering kali menggerakkan perilaku manusia atau keputusan-keputusan yang diambil ahli oleh manusia secara perorangan maupun dalam kelompok, terutama dalam hubungannya dengan pemanfaatan common property. Common property adalah sumber-sumber daya alam yang tidak menjadi hak perorangan, tetapi setiap orang dapat menggunakan atau memanfaatkannya untuk kepentingan masing-masing.

Common property itu meliputi sungai, padang rumput, udara, laut, karena sumber daya itu dapat dan bebas untuk dimanfaatkan oleh setiap orang memenuhi kebutuhannya masing-masing, maka setiap orang berusaha dan berlomba-lomba untuk memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya semaksimal mungkin guna memperoleh keuntungan pribadi yang sebesar-besarnya.

b. Bencana Alam.

Hampir disetiap wilayah di belahan bumi ini pernah terjadi bencana alam, bencana itu sendiri dapat terjadi karena proses alam yang berasal dari perut bumi atau pada permukaan bumi. Bencana alam dapat mengubah tata kehidupan manusia disekitarnya, misalnya Gunung Meletus. Gunung merapi yang meletus dapat dilihat dari segi negatifnya merusak lingkungan, karena lahar panas dapat membakar dan menghancurkan kehidupan disekitarnya.⁴⁵

Rusaknya lingkungan hidup sebagai akibat bencana alam dapat mempengaruhi kehidupan dalam jangkaun ke depan. Pembangunan yang telah direncanakan

⁴⁵ Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA), h. 21



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memperbaiki tatanan maupun system kehidupan tidak terlaksana, mengingat fondamen yang dijadikan pendukung tidak dapat diharapkan kembali, yang berarti harus menetapkan kebijaksanaan baru.⁴⁶

3. Keputusan AMDAL.

Keputusan Badan atau Pejabat yang menetapkan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dari tinjauan kontitusi, maka dapat dijelaskan bahwa hal itu termasuk tugas dari negara dalam rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penetapan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan terhadap dokumen Amdal yang diajukan.

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."⁴⁷ Dengan demikian persoalan hak atas lingkungan merupakan hak asasi yang sudah dijamin oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

Sehingga apapun keputusan Badan atau Pejabat dalam kaitannya dengan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan harus dalam mendukung hak asasi untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal, faktor-faktor tersebut adalah:

⁴⁶ *Ibid*, h.22

⁴⁷ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- a. Pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong. Perubahan desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong bagi usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda.
- b. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Terjadinya perubahan lingkungan hidup secara mendasar berarti hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidup awal yang menjadi dasar penyusunan Amdal.⁴⁸

C. Pengelolaan Kualitas Air.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana dalam pasal 1 ayat (3) yaitu Pengelolaan kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang di inginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.⁴⁹

Mutu air adalah suatu kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁵⁰. Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :

⁴⁸ Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999)

⁴⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, *Op.Cit*, pasal 1 ayat 3

⁵⁰ *Ibid*, pasal 1 ayat 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi tanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.⁵¹

Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan dengan baku mutu air yang ditetapkan disebut status mutu air.

Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :

1. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;

⁵¹ *Ibid*, pasal 8 ayat 1

2. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.⁵²

Adapun wewenang pemerintah terhadap pengelolaan kualitas air ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah melakukan pengelolaan kualitas air lintas propinsi dan atau lintas batas negara.
2. Pemerintah Propinsi mengkoordinasikan pengelolaan kualitas air lintas Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengelolaan kualitas air di Kabupaten/Kota.⁵³

D. Pengendalian Pencemaran Air.

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar disebut daya tampung beban pencemaran . Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Sedangkan baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah

⁵² *Ibid*, pasal 14 ayat 1

⁵³ *Ibid*, pasal 5



unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.⁵⁴

Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.⁵⁵ Adapun wewenang pemerintah terhadap pengendalian pencemaran air ini adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Propinsi dan atau lintas batas negara.
2. Pemerintah Propinsi melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang lintas Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pencemaran air pada sumber air yang berada pada Kabupaten/Kota.⁵⁶

Adapun cara pengendalian pencemaran air yang dilakukan pemerintah adalah sebagai berikut.

- a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran.
- b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran.
- c. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah.
- d. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

⁵⁴ <http://garasibiologi.blogspot.com/2013/05/pengelolaan-kualitas-air-dan.html>

⁵⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, *Op.Cit*, Pasal 1 ayat 4.

⁵⁶ *Ibid*, pasal 18.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Memantau kualitas air pada sumber air.

f. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.⁵⁷

E. Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup.⁵⁸

Setiap usaha industri sudah seharusnya memiliki suatu izin tertentu seperti yang di maksud dalam pasal 18 Ayat 1 yang berbunyi “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup untuk memperoleh izin melakukan usaha dan/atau kegiatan”.⁵⁹

2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

⁵⁷ Ibid, Pasal 20.

⁵⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1.

⁵⁹ Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap pelaku usaha industri yang memiliki dampak terhadap lingkungan sudah semestinya memiliki izin dari pemerintah sebagaimana yang tercantum didalam pasal 40 ayat 1 yang berbunyi “*Setiap usaha dan atau kegiatan yang akan membuang limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota*”.⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, *Op.Cit*, pasal 40 ayat 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti belum berjalan dengan baik karena terdapat kawasan industri sagu yang masih membuang limbah sagu ke laut/sungai dan tak memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang kurang memadai serta kilang sagu tersebut belum memiliki izin seperti yang tertera pada pasal 40 ayat 1 yang berbunyi *“setiap usaha atau kegiatan yang akan membuang limbah ke air atau sumber air wajib mendapat izin tertulis dari bupati/walikota”*.
2. Faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu karena keterbatasan sumber daya manusia, karena Kabupaten Kepulauan Meranti kekurangan pegawai dan juga tidak memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Dan faktor penghambat lainnya adalah ketidaktahuan pelaku usaha kilang sagu terhadap peraturan pemerintah ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh agar pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Desa Tenan Kabupaten Kepulauan Meranti terlaksana dengan baik, maka peneliti memberi saran sebagai berikut.

1. Diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti agar ditingkatkan lagi sosialisasi peraturan pemerintah ini kepada masyarakat supaya dapat menimbulkan kesadaran akan hukum dan bisa berpartisipasi dalam mencapai tujuan dari peraturan ini.
2. Diharapkan kepada pelaku usaha kilang sagu agar senantiasa memperhatikan prosedur-prosedur hukum yang berlaku sebelum melakukan suatu kegiatan industri agar tidak terjadi suatu pelanggaran hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2011).
- Amiruddin dan Zainal Asakin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004).
- Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta : PT RINEKA CIPTA).
- Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1999).
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Perdana Ginting, *Sistem Pengelolaan Lingkungan Dan Limbah Industri*, (Bandung : CV. Yrama Widya, 2007).
- Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011).
- Raihan , *Lingkungan Dan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Universitas Islam Jakarta, 2007).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soedarto, *Lingkungan Dan Kesehatan*, (Jakarta : CV. Sagung Seto, 2013)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2012).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013).
- Suharto, *Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011)
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- Suprihanto Notodarmojo, *Pencemaran Tanah dan Air Tanah*, (Bandung: ITB, 2005).
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers)
- Tresna Sastrawijaya, *Pencemaran Lingkungan*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000).
- Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta : Andi, 2004).
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

INTERNET :

[Hhttp://www.dpr.go.id/jdih/index/id/529](http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/529)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Tebing_Tinggi_Barat,_Kepulauan_Meranti.](https://id.wikipedia.org/wiki/Tebing_Tinggi_Barat,_Kepulauan_Meranti)

<https://profildesatenan.blogspot.com>

http://news.meranti.go.id/web/post_full/6446

<http://www.wartariau.com/read-27328-2018-09-01-limbah-pabrik-pengolahan-sagu-di-meranti-matikan-habitat-ikan.html>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Meranti

<http://garasibiologi.blogspot.com/2013/05/pengelolaan-kualitas-air-dan.html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (STUDI KASUS KILANG SAGU DI DESA TENAN KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)**” yang ditulis oleh :

Nama	: Firdaus
NIM	: 11527102822
Program Studi	: Ilmu Hukum
Telah dimunaqasahkan pada :	
Hari / Tanggal	: Kamis, 10 Desember 2020
Waktu	: 08.00 WIB
Tempat	: Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Desember 2020
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH

.....

Sekretaris
Joni Alizon, SH., MH

.....

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

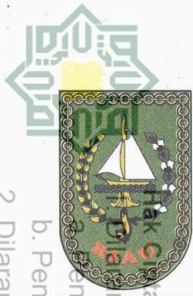
.....

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

.....

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/27676
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.IPP.00.9/9072/2019 Tanggal 11 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : FIRDAUS
2. NIM / KTP : 11527102822
3. Program Studi : ILMU HUKUM
4. Jenjang : S1
5. Alamat : KEPULAUAN MERANTI
6. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (STUDI KASUS KILANG SAGU DI DESA TENAN KECAMATAN TEBING BARAT TINGGI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)
7. Lokasi Penelitian : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

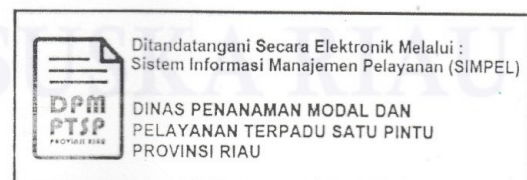
Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 11 November 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kepulauan Meranti
- Up. Kepala DPMTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

Surat mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Surat mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini, penyalinan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Jalan Johari Dagang Komplek Perkantoran Bupati, Telp/ Fax. (0763) 33630
E-Mail : dpmptsptkmeranti@gmail.com
SELATPANJANG

Kode Pos 28753

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 053/DPMPTSPK/XII/2019/SKP/172

TENTANG :

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti, setelah membaca surat dari : **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/27676 Tanggal 11 November 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi penelitian kepada :

Nama : **Firdaus**
NIM : **11527102822**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Jenjang : **S1**
Alamat : **Kepulauan Meranti**
Judul Penelitian : **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air (Studi Kasus Kilang Sagu di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)**
Lokasi Penelitian : **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal surat ini dibuat.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait, agar dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian ini, terima kasih.

Dibuat di : **Selatpanjang**
Pada tanggal : **06 Desember 2019**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI


Drs. ASRORUDIN, M.Si

Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670204 199503 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 Jl. Pembangunan I No. 13 Telp./FAX. 0763 - 434708 E-mail : DLHK.Kep.Meranti@gmail.com
SELATPANJANG - 28753

SURAT KETERANGAN

Nomor : 100/DLH-SET/426

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. SAID ASMARUDDIN, MM
 NIP : 19611231 198010 1 002
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda /IV.c
 Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Firdaus
 NIM : 11527102822
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Jenjang : Strata Satu (S.1)
 Alamat : Jl. Yuda Karya, Kel. Tuah Karya, Kec. Tampan, Panam - Pekanbaru
 Judul Penelitian : **Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air (Studi Kasus Kilang Sagu di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)**
 Lokasi Penelitian : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti

Nama tersebut benar telah melakukan Riset/Prariset dan Pengumpulan data di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Tugas Akhir yang berjudul **"PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR (STUDI KASUS KILANG SAGU DI DESA TENAN KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

Drs. SAID ASMARUDDIN, MM

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 19611231 198010 1 002

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - c. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT
KEPALA DESA TENAN**

Jl. Utama Tlp 0763.....Fex.....

TENAN

Kode Pos. 28753

Nomor : 005/UM/XII/2019/210

Perihal : **SURAT IZIN PENELITIAN**

Tenan, 20 Desember 2019

Kepada Yth :

PENGUSAHA KILANG SAGU

Di
Tempat.

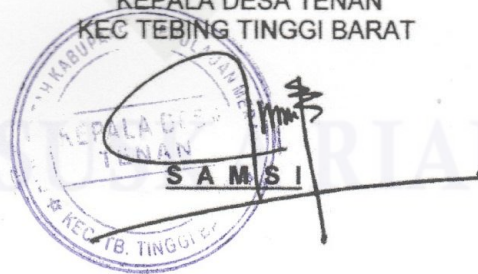
Dengan Hormat,

Dalam rangka kegiatan Pelaksanaan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan skripsi dari mahasiswa UIN SUSKA RIAU, maka bersama ini kami dari Pemerintah Desa memberikan izin untuk melakukan penelitian tentang penegelolaan kualitas air (studi kilang sugu di desa tenan) . Untuk itu kami mohon kerjasamanya dari seluruh Pimpinan/ Pengusaha kilang sugu yang berada di Desa Tenan.

Demikianlah surat izin ini kami sampaikan, atas Kerjasamanya yang baik di ucapkan terimakasih.

Tenan, 20 Desember 2019

**KEPALA DESA TENAN
KEC TEBING TINGGI BARAT**



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR (STUDI KASUS KILANG SAGU DI DESA TENAN KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)", ditulis oleh saudara :

Nama : FIRDAUS
NIM : 11527102822
Program Studi : Ilmu Hukum

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Jum'at / 18 Oktober 2019
Narasumber : Roni Kurniawan, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Mengetahui,
Kepala bagian Tata Usaha
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Pekanbaru, 30 Oktober 2019

Narasumber


Erni, S.Sos., MM
NIP. 19680226 199103 2 002


Roni Kurniawan, SH, MH
NIK. 13021 7 086

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilindungi Undang-Undang

ciptamilik UIN Suska Riau

Sae Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9959/2019

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FIRDAUS
N I M : 11527102822
Jurusan : ILMU HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 13 NOVEMBER 2019

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 20 Desember 2019

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP 195807121986031005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : FIRDAUS
NIM : 11527102822
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 82 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIANPENCEMARAN AIR (STUDI KASUS KILANG SAGU DI DESA TENAN KECAMATAN TEBING TINGGI BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI)

Pembimbing: Firdaus, SH., MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 05 Januari 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL

NIP. 1988 0430 2019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Firdaus lahir di Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Penulis lahir pada tanggal 19 November 1996 dan merupakan anak ke empat dari lima bersaudara, lahir dari pasangan Tarmizi dan Ainun. Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 016 Selatpanjang dan lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya di Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri Selatpanjang dan lulus pada tahun 2012. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Selatpanjang dan lulus pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2015 dan penulis lulus pada fakultas Syari'ah dan Hukum dengan program studi Ilmu Hukum.

Pada bulan Juli dan Agustus 2017 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di kantor Kejaksaan Negeri Selatpanjang. Selanjutnya pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2018 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah, penulis melakukan penelitian di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Studi Kasus Kilang Sagu Di Desa Tenan Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti)” dan Alhamdulillah dinyatakan lulus oleh tim sidang munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.